



SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tampiala, xxxxxx (umur xxxxx tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupatentolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, Desa Tampiala, Dampal Selatan, Kab. ToliToli, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usman Ali, S.H.**, Advokat yang berkantor di LBH Progressif, yang beralamat di Jalan Yoto No. 5 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tampiala, XXXXXXXX (umur XXXX tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor XXXXX/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal XXXXXtelah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal XXXXXXXXXX, dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikahnya di Bangkir, tertanggal 16 Nopember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 bulan kemudian pindah kerumah Bersama di Desa Tampiala, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri serta telah di karunia anak 2 orang kembar yakni XXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, kedua anak tersebut sehat dan dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sekitar bulan September tahun 2019, sampai dengan sekarang. karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah
 - a. Bahwa Tergugat Telah menikah dengan wanita lain ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir bhatin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang ;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2020, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang meninggalkan kediaman Bersama pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tampiala, Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 20 November 2020, dan 04 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7204015511860002, atas nama Nasira, tertanggal 28 November 2013, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermeterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 16 Nopember 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

II.-----

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soni, XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Trans Sulawesi, Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Hanapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 bulan kemudian pindah kerumah Bersama di Desa Tampiala, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang kembar yakni XXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, kedua anak tersebut sehat dan dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bhatin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soni, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Siginti, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Hanapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 bulan kemudian pindah kerumah Bersama di Desa Tampiala, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang kembar yakni XXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, kedua anak tersebut sehat dan dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bhatin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nasira, tertanggal 28 November 2013, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan, sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bhatin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 29 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang kembar yakni XXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tampiala, 24-01-2009, umur 11 tahun, kedua anak tersebut sehat dan dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat Telah menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak September 2019 sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Februari 2020 atau 10 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. -----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. -----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ihsan, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., dan Nanda Trisna Putra, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Ihsan, S.H.I

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

1.	PNPB	: Rp60.000,
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,
3.	Panggilan	: Rp700.000,
4.	<u>Materai</u>	: Rp6.000,
	Jumlah	: Rp816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Sri Susilowati, SH

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)